

EVALUASI PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) DI SMP NEGERI 1 DAWARBLANDONG KABUPATEN MOJOKERTO

Novia Muqti Yunisia Ainur Haqiqi

S1 Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
noviamuqti@gmail.com

Indah Prabawati, S. Sos.,M.Si

S1 Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
indahprabawati@unesa.ac.id

Abstrak

Program Indonesia Pintar (PIP) adalah suatu program pemberian bantuan pendidikan kepada anak usia sekolah (usia 6-21 tahun) yang berasal dari keluarga miskin, rentan miskin (pemilik Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), peserta Program Keluarga Harapan (PKH), yatim piatu, penyandang disabilitas, dan korban bencana alam/musibah. Salah satu wilayah yang melaksanakan Program Indonesia Pintar (PIP) adalah Kabupaten Mojokerto. Program Indonesia Pintar (PIP) dilaksanakan diseluruh satuan pendidikan di Kabupaten Mojokerto, salah satunya adalah SMP Negeri 1 Dawarblandong. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Evaluasi Program Indonesia Pintar (PIP) di SMP Negeri 1 Dawarblandong Kabupaten Mojokerto. Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian berdasarkan 6 (enam) criteria evaluasi kebijakan menurut William N Dunn yang meliputi: Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas, dan Ketepatan. Teknik analisis data dilakukan berdasarkan teknik oleh Miles dan Huberman. Hasil Penelitian Evaluasi Program Indonesia Pintar (PIP) di SMP Negeri 1 Dawarblandong Kabupaten Mojokerto, yaitu: 1) Efektivitas, dapat dikatakan sudah efektif karena tidak pernah terdapat kasus siswa putus sekolah di SMP Negeri 1 Dawarblandong dan sudah berjalan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan, 2) Efisiensi, masih kurang efisien karena proses pencairan yang tidak tepat waktu dan pihak sekolah kesulitan untuk memantau penggunaan dana bantuan, 3) Kecukupan, masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan sekolah siswa yang kurang mampu, 4) Perataan, masih belum merata diberikan terhadap kelompok sasaran, 5) Responsivitas, yaitu respon yang diberikan pihak pelaksana dan kelompok sasaran sangat baik dan positif, 6) Ketepatan, Program Indonesia Pintar (PIP) masih belum tepat sasaran. Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) di SMP Negeri 1 Dawarblandong belum berjalan dengan baik. Saran dari peneliti adalah lebih selektif dalam menentukan kelompok sasaran dan konsisten lagi dalam melakukan pengontrolan kepada peserta penerima Program Indonesia Pintar (PIP) dalam menggunakan dana bantuan.

Kata kunci: Evaluasi, Kebijakan Pendidikan, Program Indonesia Pintar (PIP)

Abstract

The Program Indonesia Pintar (PIP) is a program of providing educational assistance to school-aged children (aged 6-21 years) who come from poor, vulnerable, poor families (holders of Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), participants of the Program Keluarga Harapan (PKH), orphans, people with disabilities, and victims of natural disasters/disaster. One of the regions implementing the Program Indonesia Pintar (PIP) is Mojokerto District, the Program Indonesia Pintar (PIP) is implemented in all education units in Mojokerto Regency, one of which is SMP Negeri 1 Dawarblandong. aims to describe and analyze the Evaluation of the Program Indonesia Pintar (PIP) in SMP Negeri 1 Dawarblandong, Mojokerto District. The type of research used is descriptive with a qualitative approach. The focus of the research is based on 6 (six) policy evaluation criteria according to William N Dunn which include: Effectiveness, Efficiency, Adequacy, Flattening, Responsiveness, and Accuracy. The data analysis technique was carried out based on the technique by Miles and Huberman. Research Results of the Program

Indonesia Pintar (PIP) Evaluation in SMP Negeri 1 Dawarblandong, Mojokerto District, namely: 1) Effectiveness, implementation has been cases of dropout students in SMP Negeri 1 Dawarblandong and have been in accordance with technical guidelines set, 2) Efficiency, is still less efficient due to improper disbursement processes time and the school is having difficulty monitoring the use of aid funds, 3) Adequacy, is still not enough to meet the needs of schools for underprivileged students, 4) Alignment, is still not evenly given to the target group, 5) Responsiveness, that is, the response given by the implementing party and the target group is very enthusiastic, 6) Accuracy, the Program Indonesia Pintar (PIP) is still not on target. It can be concluded that the implementation of the Program Indonesia Pintar (PIP) at SMP Negeri 1 Dawarblandong has not gone well. Suggestions from researchers are more selective in determining target groups and more consistent in controlling the participants of the Program Indonesia Pintar (PIP) in using aid funds.

Keywords: Evaluation, Education Policy, Program Indonesia Pintar (PIP)

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu usaha untuk mewujudkan pembangunan bangsa. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 31 tentang pendidikan menerangkan, ayat (1) setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan (2) setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Usaha pemerintah dalam memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia saat ini adalah dengan menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya berbagai program pemerintah untuk menjamin pendidikan rakyat Indonesia khususnya bagi warga yang memiliki tingkat perekonomian rendah. Program pendidikan yang dimaksud seperti program BOS (Bantuan Operasional Sekolah), program BSM (Bantuan Siswa Miskin), program Bidik Misi (Beasiswa Pendidikan Siswa Miskin), program LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan), dan program yang lainnya.

Program-program tersebut sengaja dibuat oleh pemerintah Indonesia karena melihat berbagai permasalahan pendidikan yang terjadi di Indonesia. Salah satu permasalahan pendidikan yang cukup memperhatikan di Indonesia adalah tingginya jumlah siswa putus sekolah. Tingginya jumlah siswa putus sekolah sering kali disebabkan karena faktor ekonomi. faktor ekonomi dapat menjadi penghambat siswa untuk melanjutkan sekolah, karena bagi masyarakat yang tingkat ekonominya rendah sering kali tidak mampu untuk membayar biaya sekolah yang tinggi.

Jumlah siswa putus sekolah menurut jenjang pendidikan di Indonesia pada tahun ajaran 2014/2015 hingga tahun ajaran 2018/2019 jumlahnya tidak stabil. Pada tahun ajaran 2014/2015 jumlah siswa putus sekolah adalah 416.410 anak, pada tahun ajaran

2015/2016 jumlahnya turun menjadi 273.960 anak, dan pada tahun ajaran 2016/2017 jumlah siswa putus sekolah juga menurun menjadi 187.078 anak. Namun jumlah tersebut kemudian naik pada tahun ajaran 2017/2018 yaitu sebesar 187.828 anak dan semakin tinggi pada tahun ajaran 2018/2019 yaitu sebanyak 298.127 anak. Naiknya jumlah siswa putus sekolah di Indonesia, membuat pemerintah semakin tertarik untuk terus melakukan upaya perbaikan dalam bidang pendidikan. hal tersebut dilakukan agar permasalahan jumlah siswa putus sekolah di Indonesia dapat segera teratasi. Upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk mengatasi permasalahan jumlah siswa putus sekolah adalah dengan membuat kebijakan yaitu Program Indonesia Pintar (PIP).

Program Indonesia Pintar (PIP) adalah suatu program pemberian bantuan pendidikan kepada anak usia sekolah (usia 6-21 tahun) yang berasal dari keluarga miskin, rentan miskin (pemilik Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), peserta Program Keluarga Harapan (PKH), yatim piatu, penyandang disabilitas, dan korban bencana alam/musibah. Program Indonesia Pintar (PIP) ini adalah sebagai kelanjutan dan perluasan sasaran dari program Bantuan Siswa Miskin (BSM).

Program Indonesia Pintar (PIP) bertujuan untuk meningkatkan akses bagi anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah untuk mendukung pelaksanaan Pendidikan Menengah Universal/Rintisan Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun. Program Indonesia Pintar (PIP) juga bertujuan untuk mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (*drop out*) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi dan menarik siswa putus sekolah (*drop out*) atau tidak melanjutkan agar kembali mendapatkan layanan

pendidikan di sekolah/Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).

Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan bagian dari kebijakan Presiden Joko Widodo yang diresmikan sejak tanggal 3 November 2014 dan mulai berlaku di Indonesia sejak tahun 2015. Penyelenggara pada Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan kerjasama oleh tiga kementerian yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Agama (Kemenag). Program Indonesia Pintar (PIP) dilaksanakan oleh direktorat jenderal terkait, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dan satuan pendidikan. Program Indonesia Pintar (PIP) dilaksanakan dengan dikeluarkannya Kartu Indonesia Pintar (KIP), yang mana kartu tersebut diberikan sebagai penanda/identitas penerima bantuan pendidikan Program Indonesia Pintar (PIP). Program Indonesia Pintar (PIP) ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Program Indonesia Pintar.

Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan program nasional yang dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu wilayah yang mengimplementasikan Program Indonesia Pintar (PIP) adalah Provinsi Jawa Timur. Proses pencairan Program Indonesia Pintar (PIP) di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019 masih belum diberikan seluruhnya kepada kelompok sasaran. Rata-rata proses pencairan dana pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur adalah 62,75%. Dilihat dari rata-rata tersebut Kabupaten Mojokerto proses pencairannya masih dibawah rata-rata provinsi Jawa Timur yaitu 61,27%.

Kabupaten Mojokerto merupakan salah satu wilayah di Jawa Timur yang mengimplementasikan Program Indonesia Pintar (PIP). Program Indonesia Pintar (PIP) di Kabupaten Mojokerto mulai diterapkan di seluruh satuan pendidikan sejak tahun 2016. Salah satu satuan pendidikan di Kabupaten Mojokerto yang melaksanakan Program Indonesia Pintar (PIP) adalah SMP Negeri 1 Dawarblandong. Pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) di SMP negeri 1 Dawarblandong terdapat beberapa kendala yaitu proses pencairan dana bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) yang tidak tepat waktu. Proses pencairan dana bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) dibagi menjadi beberapa tahap dalam 1 tahun, tahap tersebut sudah ditentukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. SMP Negeri 1

Dawarblandong Kabupaten Mojokerto pada tahun 2019 dalam aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) proses pencairan dana Program Indonesia Pintar (PIP) terbagi menjadi 4 (empat) tahap yaitu tahap 1, tahap 5, tahap 9, dan tahap 16, dari keempat tahap tersebut hanya mampu mencairkan dana bantuan sebanyak 72,82%. Tahun 2019 jumlah seluruh kelompok sasaran Program Indonesia Pintar (PIP) di SMP Negeri Dawarblandong pada aplikasi Sistem Informasi Program Indonesia Pintar (SiPINTAR) adalah sebanyak 217 siswa, akan tetapi yang dapat mencairkan dana bantuan hanya sebanyak 158 siswa. Proses pencairan Program Indonesia Pintar (PIP) di SMP Negeri 1 Dawarblandong pada tahun 2019 kurang 59 anak yang belum mendapat dana bantuan Program Indonesia Pintar (PIP).

Proses pencairan dana bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) yang tidak tepat waktu, menimbulkan dampak negatif pada kelompok sasaran. Dampak negatif yang terjadi adalah siswa penerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) di SMP Negeri 1 Dawarblandong menunggak membayar biaya sekolah. Hal tersebut dikarenakan bagi siswa yang berasal dari keluarga yang kurang mampu sering kali harus menunggu pencairan dana bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) untuk dapat membayar kebutuhan sekolah.

Kendala yang selanjutnya adalah karena kurang maksimalnya proses penjangkauan peserta penerima Program Indonesia Pintar (PIP) di Kabupaten Mojokerto, menyebabkan kelompok sasaran Program Indonesia Pintar (PIP) di SMP Negeri 1 Dawarblandong masih belum tepat sasaran. Belum tepat sasaran karena masih terdapat beberapa siswa yang mampu tetapi mendapat bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) dan ada siswa yang tidak mampu tetapi tidak mendapat bantuan Program Indonesia Pintar (PIP).

Dari uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian Evaluasi Program Indonesia Pintar (PIP) ini. Adapun judul penelitian ini adalah "Evaluasi Program Indonesia Pintar (PIP) di SMP Negeri 1 Dawarblandong Kabupaten Mojokerto."

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan fokus penelitian ini adalah kriteria evaluasi kebijakan menurut William N Dunn. Subjek penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data dalam penelitian

ini melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis datanya menggunakan analisis data kualitatif, mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman dalam Usman (2009:85), yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/ verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di paparkan, maka dapat dilakukan analisis Evaluasi Program Indonesia Pintar (PIP) di SMP Negeri 1 Dawarblandong Kabupaten Mojokerto menggunakan kriteria evaluasi kebijakan menurut William N Dunn. Teori tersebut meliputi Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas, dan Ketepatan. Berikut merupakan uraian indikator-indikator tersebut:

1. Efektivitas

Efektivitas selalu berkaitan dengan apakah hasil kebijakan yang dicapai sudah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. SMP Negeri 1 Dawarblandong hampir setiap tahun tidak ada kasus siswa putus sekolah karena kesulitan biaya sekolah. Hal tersebut dikarenakan dengan dilaksanakannya Program Indonesia Pintar (PIP) dapat memberikan manfaat yang besar kepada siswa. Siswa yang kurang mampu mendapatkan layanan pendidikan di sekolah mulai dari fasilitas yang memadai, lingkungan sekolah yang nyaman, hingga tenaga pendidik yang memiliki kompetensi yang bagus. Akses tersebut dapat di manfaatkan oleh siswa penerima Program Indonesia Pintar (PIP) selama ia bersekolah di SMP Negeri 1 Dawarblandong. Siswa yang kurang mampu sama sekali tidak dibedakan dalam pemberian fasilitas, tenaga pendidik, dan hal lainnya. Di SMP ini semua sama perlakuannya baik kepada siswa yang kurang mampu maupun siswa yang mampu.

Program Indonesia Pintar (PIP) yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Dawarblandong sudah berjalan sesuai dengan Petunjuk Teknis yang telah ditetapkan. Pelaksana Program Indonesia Pintar (PIP) di SMP Negeri 1 Dawarblandong yaitu bapak Moh. Khudori sudah melaksanakan semua prosedur pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP). Pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) di SMP Negeri 1 Dawarblandong selain dapat meringankan beban biaya sekolah siswa juga membawa perubahan positif kepada pola pikir

siswa. Siswa yang kurang mampu menjadi lebih bersemangat untuk berprestasi karena beban biaya sekolah menjadi lebih ringan dengan mendapat dana bantuan Program Indonesia Pintar (PIP).

Pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) di SMP Negeri 1 Dawarblandong apabila dikaitkan dengan kriteria efektivitas maka dapat dikatakan sudah efektif karena tidak pernah terdapat kasus siswa putus sekolah di SMP Negeri 1 Dawarblandong, pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) di SMP Negeri 1 Dawarblandong juga berjalan sesuai dengan petunjuk teknis/prosedur yang telah ditetapkan dan Program Indonesia Pintar (PIP) di SMP Negeri 1 Dawarblandong mampu memberikan manfaat yang besar kepada kelompok sasaran yaitu dapat mengurangi beban biaya sekolah dan merubah pola pikir siswa menjadi lebih semangat untuk berprestasi di sekolah.

2. Efisiensi

Efisiensi biasanya dinyatakan ketika suatu kebijakan dinilai efektif dengan melihat proses atau usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari kebijakan tersebut. Upaya yang dilakukan oleh pelaksana/penanggungjawab Program Indonesia Pintar (PIP) adalah dengan melakukan sosialisasi. Sosialisasi dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto dan pihak pelaksana sekolah. Pelaksana sekolah yaitu bapak Dori selaku staf tata usaha bidang kesiswaan sekaligus penanggungjawab Program Indonesia Pintar (PIP) di SMP Negeri 1 Dawarblandong telah memberikan sosialisasi kepada kelompok sasaran dan walimurid penerima Program Indonesia Pintar (PIP).

Upaya selanjutnya yang dilakukan oleh bapak Dori adalah penjangkaran peserta didik yang memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), peserta Program Keluarga Harapan (PKH), dan yatim piatu. Proses penjangkaran tersebut dilaksanakan pada awal Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yaitu dengan cara menyebarkan angket yang berisi biodata siswa dan yang memiliki kartu bantuan sosial, kemudian bagi siswa yang memiliki kartu bantuan sosial seperti PKH, KKS, atau KIP di foto copy lalu dikumpulkan ke pak bapak Dori.

Kriteria Efisiensi yang kedua adalah pada pengelolaan sumberdaya anggaran. Dana yang digunakan untuk pengelolaan Program Indonesia

Pintar (PIP) pada tingkat daerah provinsi dan tingkat kabupaten/kota bersumber dari masing-masing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penetapan besaran dana yang dapat dicairkan pada Program Indonesia Pintar (PIP) yaitu meliputi:

- a. Peserta didik SD/MI/Paket A mendapatkan Rp450.000,-/tahun
- b. Peserta didik SMP/MTs/Paket B mendapatkan Rp750.000,-/tahun
- c. Peserta didik SMA/SMK/MA/Paket C mendapatkan Rp1.000.000,-/tahun

SMP Negeri 1 Dawarblandong Kabupaten Mojokerto dalam pencairan Program Indonesia Pintar (PIP) dilakukan di Bank BRI, karena di Kecamatan Dawarblandong hanya terdapat 1 yaitu Bank BRI saja. Proses pencairan Program Indonesia Pintar (PIP) di SMP Negeri 1 Dawarblandong juga terdapat kendala. Kendala yang terjadi adalah proses pencairan dana bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) yang tidak tepat waktu. Hal tersebut menyebabkan beberapa siswa yang mendapat dana bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) di SMP Negeri 1 Dawarblandong masih menunggak pembayaran di sekolah, karena bagi siswa yang berasal dari keluarga yang kurang mampu sering kali harus menunggu pencairan dana bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) untuk dapat membayar kebutuhan sekolah.

Dana bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) agar digunakan sesuai dengan mekanisme pemanfaatan, maka pelaksana/penanggungjawab Program Indonesia Pintar (PIP) harus melakukan pengawasan. Pengawasan yang dilakukan oleh pelaksana/penanggungjawab Program Indonesia Pintar (PIP) di SMP Negeri 1 Dawarblandong mengalami kesulitan, yaitu karena pada tahun 2018 dan 2019 proses pencairan Program Indonesia Pintar (PIP) diambil siswa bersama orang tua. Hal itu yang menjadi kendala dalam proses pengawasan yang dilakukan oleh pihak sekolah, karena uang bantuan langsung diterima oleh orangtua siswa. Uang bantuan yang sudah diterima oleh orang tua siswa, pihak sekolah tidak dapat memantau bagaimana penggunaan uang tersebut.

Pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) semakin mudah dengan adanya bantuan dari aplikasi. Aplikasi yang digunakan pelaksana Program Indonesia Pintar (PIP) adalah aplikasi Dapodik dan aplikasi Sipintar. Penerapan

aplikasi Dapodik dan Sipintar selain mempermudah pelaksana juga terdapat beberapa kelemahan. Kelemahan pada aplikasi Sipintar adalah data yang dapat dibuka dan dilihat hanya data pada tahun 2018 dan tahun 2019. Hal tersebut dapat terjadi karena pada tahun 2015, 2016, dan 2017 aplikasi Sipintar masih dalam masa perbaikan. Kelemahan pada aplikasi Dapodik tidak dapat mendeteksi siswa yang sudah lulus sekolah, sehingga kenyataan dilapangan masih terdapat beberapa siswa yang sudah lulus namun masih mendapat bantuan Program. Indonesia Pintar (PIP).

Berdasarkan hasil temuan peneliti di lapangan apabila dikaitkan dengan kriteria efisiensi maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) di SMP Negeri 1 Dawarblandong tersebut berjalan masih kurang efisien. Kurang efisien yaitu dalam segi upaya yang dilakukan pelaksana memang sudah maksimal akan tetapi dalam pengelolaan anggaran masih belum efisien. Hal tersebut dikarenakan proses pencairan Program Indonesia Pintar (PIP) masih tidak tepat waktu, pihak sekolah kesulitan untuk memantau penggunaan dana bantuan Program Indonesia Pintar (PIP), dan aplikasi yang digunakan pelaksana yaitu aplikasi Dapodik masih terdapat kelemahan dalam mendeteksi siswa yang sudah lulus dari sekolah.

3. Kecukupan

Menurut Dunn (2003:430) “kecukupan (Adequacy) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah”. Kriteria kecukupan dalam evaluasi Program Indonesia Pintar (PIP) di SMP Negeri 1 Dawarblandong Kabupaten Mojokerto dapat dikatakan belum cukup untuk memenuhi kebutuhan biaya pendidikan siswa yang kurang mampu. Kebutuhan untuk sekolah setiap tahunnya naik akan tetapi jumlah bantuan yang diberikan Program Indonesia Pintar (PIP) tetap. Siswa di SMP Negeri 1 Dawarblandong dalam 1 tahun mengeluarkan biaya untuk membayar buku LKS, seragam, dan keperluan bimbingan belajar tambahan bagi kelas IX. Kebutuhan siswa pada kenyataannya bukan hanya itu saja, banyak kebutuhan pribadi seperti buku tulis, alat tulis, sepatu, tas dll. Apabila kebutuhan tersebut ditotal dalam 1 tahun, dana bantuan Program Indonesia

Pintar (PIP) yang berjumlah Rp 750.000/tahun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan siswa.

Pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) di SMP Negeri 1 Dawarblandong terdapat beberapa kendala yang harus dihadapi oleh pelaksana. Kendala yang terjadi adalah ada seorang siswa kelas IX yang bernama Amanda memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP), akan tetapi anak tersebut tidak menerima manfaat dari Program Indonesia Pintar (PIP) dari kelas VII, VIII dan IX di SMP Negeri 1 Dawarblandong. Hal tersebut dapat terjadi karena siswa tidak mengisi angket dan tidak mengumpulkan berkas pada saat awal masuk sekolah, sehingga Amanda tidak terdaftar sebagai kelompok sasaran. Penanggungjawab Program Indonesia Pintar (PIP) di SMP Negeri 1 Dawarblandong dalam mengatasi hal tersebut belum memberikan tindakan apapun. Hal tersebut dilakukan karena melihat kondisi siswa yang sudah kelas IX sehingga sebentar lagi lulus sekolah, bukan hanya itu saja untuk mengajukan siswa agar mendapat Program Indonesia Pintar (PIP) juga memakan waktu yang lama.

Kendala yang selanjutnya adalah bahwa pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) di SMP Negeri 1 Dawarblandong masih belum mencakup seluruh siswa yang kurang mampu. Bapak Dori selaku penanggungjawab Program Indonesia Pintar (PIP) dalam menanggapi masalah tersebut adalah dengan mengajukannya sebagai peserta penerima Program Indonesia Pintar (PIP), akan tetapi terkadang data yang sudah diusulkan tidak semua diterima. Data siswa yang tidak diterima dalam pengusulan Program Indonesia Pintar (PIP) maka selanjutnya siswa tersebut diajukan sebagai peserta penerima program Bantuan Siswa Miskin (BSM).

Berdasarkan temuan peneliti yang sudah dipaparkan diatas, maka dalam kriteria kecukupan pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) di SMP Negeri 1 Dawarblandong Kabupaten Mojokerto dikatakan belum cukup untuk memenuhi kebutuhan siswa yang kurang mampu, meskipun sikap pelaksana dianggap sudah maksimal dalam menjalankan tugasnya.

4. Perataan

Pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) di SMP Negeri 1 Dawarblandong dalam kriteria perataan dapat dilihat dari seberapa besar manfaat Program Indonesia Pintar (PIP)

dirasakan oleh seluruh kelompok sasaran. Berdasarkan temuan peneliti dilapangan pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) di SMP Negeri 1 Dawarblandong manfaatnya belum dapat dirasakan oleh kelompok sasaran secara merata.

Kelompok sasaran Program Indonesia Pintar (PIP) di SMP Negeri 1 Dawarblandong pada tahun 2019 adalah sebanyak 217 anak, akan tetapi siswa yang memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP) hanya 20% atau sekitar 43 anak saja. Kartu Indonesia Pintar (KIP) dicetak dan dikirim sejak tahun 2016, akan tetapi kenyataan di lapangan hingga tahun 2019 siswa masih banyak yang belum memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Permasalahan yang terjadi bukan hanya itu saja, terdapat permasalahan lagi di SMP Negeri 1 Dawarblandong yaitu pada bulan Desember tahun 2019 pelaksana Program Indonesia Pintar (PIP) menerima sebanyak 77 Kartu Indonesia Pintar (KIP). Kartu Indonesia Pintar (KIP) tersebut setelah dicek ternyata sebagian besar penerimanya adalah siswa yang sudah lulus dari SMP Negeri 1 Dawarblandong. Hal tersebut membuat pelaksana merasa kesulitan untuk memberikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada pemilikinya.

Pelaksana Program Indonesia Pintar (PIP) yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto memberikan sosialisasi kepada seluruh satuan pendidikan dan pihak pelaksana sekolah meneruskan hasil sosialisasi tersebut kepada kelompok sasaran dan walimurid penerima Program Indonesia Pintar (PIP). Sosialisasi tersebut dilakukan pada awal Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Hasil temuan peneliti di lapangan dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) di SMP Negeri 1 Dawarblandong manfaat program masih belum merata diberikan terhadap kelompok sasaran. Hal tersebut dapat terjadi karena Kartu Indonesia Pintar masih belum seluruhnya diberikan kepada kelompok sasaran, akan tetapi pihak pelaksana sudah melaksanakan indikator akuntabilitas dan transparansi dengan memberikan sosialisasi secara merata kepada kelompok sasaran dan menjelaskan bagaimana dana bantuan tersebut diberikan kepada kelompok sasaran.

5. Responsivitas

Pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) ini mendapatkan respon yang baik dan positif dari berbagai pihak. Respon baik tersebut diberikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto, Pelaksana Program Indonesia Pintar (PIP) di SMP Negeri 1 Dawarblandong, dan kelompok sasaran. Respon yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto dan pelaksana sekolah sangat mendukung Program Indonesia Pintar (PIP).

Respon positif juga diberikan oleh siswa penerima Program Indonesia Pintar (PIP) yaitu mereka merasa terbantu dengan dilaksanakannya Program Indonesia Pintar (PIP). Pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) di SMP Negeri 1 Dawarblandong selain membantu meringankan biaya sekolah siswa juga membawa perubahan kepada pola pikir siswa. Siswa yang kurang mampu menjadi lebih bersemangat untuk berprestasi karena beban biaya sekolah menjadi lebih ringan sehingga tidak ada lagi hambatan untuk berprestasi.

Melihat antusiasme tersebut mendorong Dinas Pendidikan melakukan yang terbaik untuk Program Indonesia Pintar (PIP) di Kabupaten Mojokerto. Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto melakukan berbagai upaya agar manfaat Program Indonesia Pintar (PIP) dapat dirasakan secara merata oleh kelompok sasaran. Upaya yang dilakukan adalah dengan selalu berkoordinasi kepada seluruh pihak yang terkait dengan Program Indonesia Pintar (PIP) yaitu sekolah, bank BRI, dan dinas sosial apabila ada kendala dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) diharap segera melapor kepada Dinas Pendidikan.

Upaya yang dilakukan oleh pelaksana di SMP Negeri 1 Dawarblandong adalah dengan memberikan sosialisasi kepada kelompok sasaran, melakukan penjangkaran kepada kelompok sasaran dan rutin melakukan pelaporan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto. Pelaporan tersebut dilakukan setiap tahun pada saat diadakan rapat koordinasi.

Berdasarkan temuan peneliti di lapangan, pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) apabila dihubungkan dengan kriteria responsivitas maka respon yang diberikan pihak pelaksana dan kelompok sasaran sangat baik. Hal tersebut dibuktikan dengan respon positif yang diberikan oleh aparatur dan kelompok sasaran.

Bukan hanya itu saja pelaksana Program Indonesia Pintar (PIP) yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto dan SMP Negeri 1 Dawarblandong juga sangat tanggap dalam mengatasi kendala pada pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP).

6. Ketepatan

Pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) di SMP Negeri 1 Dawarblandong Kabupaten Mojokerto dapat dikatakan belum tepat sasaran. Hal itu dapat terjadi karena kurang maksimalnya proses penjangkaran peserta penerima Program Indonesia Pintar (PIP) di Kabupaten Mojokerto, sehingga menyebabkan kelompok sasaran di SMP Negeri 1 Dawarblandong masih belum tepat sasaran. Hal tersebut dapat terjadi karena data awal berasal dari pihak desa yang seringkali tidak konsisten dalam memperbarui data.

Kriteria ketepatan apabila dihubungkan dengan pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) di SMP Negeri 1 Dawarblandong maka hasil pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) sudah sangat berguna bagi siswa yang kurang mampu yaitu dapat mengurangi biaya sekolah siswa, akan tetapi bagi pelaksana Program Indonesia Pintar (PIP) kurang memberikan manfaat yang berguna.

Pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) di SMP Negeri 1 Dawarblandong Kabupaten Mojokerto juga mengalami kendala dalam pendistribusian Kartu Indonesia Pintar (KIP), yaitu dari 215 siswa yang menerima Program Indonesia Pintar (PIP) pada tahun 2019 hanya 20% atau sekitar 43 anak yang memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP). Masalah yang selanjutnya adalah Kartu Indonesia Pintar (KIP) diberikan kepada siswa yang sudah lulus dari SMP Negeri 1 Dawarblandong, sehingga pelaksana kesulitan untuk memberikan kartu tersebut kepada pemiliknya.

Pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) di SMP Negeri 1 Dawarblandong, jika dihubungkan dengan kriteria ketepatan maka program ini masih belum tepat. Hal tersebut dapat terjadi karena pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) di SMP Negeri 1 Dawarblandong masih belum tepat sasaran dan bagi pelaksana juga kurang mendapat manfaat karena tidak mendapat imbalan sepeserpun dalam menjalankan tugasnya.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, Evaluasi Program Indonesia Pintar (PIP) di SMP Negeri 1 Dawarblandong Kabupaten Mojokerto belum berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat diketahui melalui kriteria evaluasi kebijakan menurut William N Dunn yang meliputi Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas, dan Ketepatan.

Pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) di SMP Negeri 1 Dawarblandong masih terdapat kendala yaitu proses pencairan yang tidak tepat waktu, pihak sekolah kesulitan untuk memantau penggunaan dana bantuan, dana bantuan masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan sekolah siswa yang kurang mampu, masih belum merata diberikan terhadap kelompok sasaran dan masih belum tepat sasaran.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Agar proses pencairan Program Indonesia Pintar (PIP) lebih tepat waktu maka tahap pencairan dapat dibagi menjadi perkelas, dibedakan hari maupun jamnya.
2. Agar Program Indonesia Pintar (PIP) dapat diterima oleh kelompok sasaran yang memiliki maupun tidak memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP), maka pelaksana/penanggungjawab program harus melakukan pendataan dengan betul kepada kelompok sasaran.
3. Terkait dengan masih adanya Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang belum didistribusikan kepada kelompok sasaran, maka pelaksana harus melakukan pendataan lebih cepat agar manfaat Program Indonesia Pintar (PIP) dapat segera dirasakan oleh pemilikinya.

Ucapan Terima Kasih

Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam penulisan jurnal ini, diantaranya:

1. Para dosen S1 Ilmu Administrasi Negara FISH UNESA.
2. Indah Prabawati, S. Sos.,M.Si, selaku Dosen Pembimbing skripsi.
3. Tjitjik Rahaju, S.Sos., M.Si, selaku Dosen Penguji dalam seminar proposal maupun sidang skripsi.
4. Badrudin Kurniawan, S.AP., M.AP., M.A, selaku Dosen Penguji dalam seminar proposal maupun sidang skripsi.

5. Deby Febrian Eprilianto, S.Sos, M,PA. Yang telah membimbing dan menelaah jurnal yang ditulis peneliti.
6. Dan pihak-pihak lainnya yang memberikan dukungan moral maupun material kepada peneliti sehingga penulisan jurnal ini dapat terselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2016. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Islamy, Irfan. 2009. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bina Aksara.
- Kemdikbud. 2019. Data penerima Program Indonesia Pintar tahun 2019. <https://pip.kemdikbud.go.id/pendidikan/data2019/smp/05/0503/050317>. (diakses tanggal 20 oktober 2019)
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- M.Ruhani. 2018. 5 Program Pemerintah ini bikin anak sekolah tinggi. <https://www.google.com/amp/s/www.brillio.net/amp/creator/dengan-program-pemerintah-ini-anak-indonesia-bisa-sekolah-setinggi-tingginya-022490.html>. (diakses tanggal 12 Oktober 2019)
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Program Indonesia Pintar.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tahir, Arifin. 2015. *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Tauran dan Prabawati, Indah. 2015. *Kebijakan Publik*. Surabaya: Unesa University Press.
- Rachman.2017.*Evaluasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Agropolitan di Desa Mayanggeneng Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro dalam Journal of Public Sector Innovation*. Volume 5 Nonor 4.